

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdullah, Rozali. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Azhary, M. Tahir. 1992. *Negara Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.

Azhary, Tahir. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta : Bulan Bintang.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Hadjon, Philipus. M, dkk. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Gadjah Mada University Press.

Harahap, Zairin. 1997. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Cetakan IV*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 5/1959 tanggal 20 april 1959 dan No. I/1962 menginstrusikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai.

Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Situmorang Victor dan Soedibyo. 1992. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soetami, A. Siti, S.H. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Redika Aditama.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan. 1999. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wijoyo, Suparto. 2005. *Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Surabaya: Airlangga University Press.

Wiyono, R. 2009. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan;

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 29/G/2014/PTUN-BDG.